

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1. Definisi Perencanaan Ekonomi.

Istilah perencanaan ekonomi sudah sangat umum kita dengar, namun sampai saat ini belum ada kesepakatan di antara para ekonom tentang pengertian istilah perencanaan ekonomi, karena masih danya anggapan yang kurang tepat yang menyiratkan bahwa konsep ekonomi berencana (perencanaan ekonomi) adalah konsep yang ditelurkan oleh komunisme/sosialisme. Alasannya adalah karena dalam perencanaan tercermin campur tangan pemerintah. Padahal dalam sistem kapitalis pun pemerintah dapat saja melakukan campur tangan yang secara tidak langsung juga mencerminkan adanya suatu perencanaan.

Perencanaan adalah suatu teknik atau cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai yang telah ditentukan dan dirumuskan oleh suatu Badan Perencana di tingkat pusat.

Arthur Lewis dalam bukunya yang berjudul *Development Planning* (1966) membagi perencanaan dalam 6 pengertian, yaitu : **Pertama**, dalam banyak literatur istilah perencanaan sering kali dihubungkan dengan faktor letak geografis, bangunan tempat tinggal, bioskop dan lainnya. Hal ini sering disebut dengan perencanaan kota dan negara, atau disebut dengan perencanaan saja. **Kedua**, perencanaan mempunyai arti memutuskan penggunaan dana pemerintah di masa yang akan datang, jika pemerintah memiliki dana untuk dibelanjakan. **Ketiga**, ekonomi berencana adalah ekonomi dimana setiap unit produksi hanya

memanfaatkan sumber daya manusia, bahan baku dan perlengkapan/peralatan yang dialokasikan dengan jumlah tertentu dan menjual produknya hanya kepada perusahaan atau perorangan yang ditunjuk oleh pemerintah. *Keempat*, perencanaan kadang kala berarti setiap penentuan sasaran produksi oleh pemerintah, apakah itu untuk perusahaan negara (BUMN) atau perusahaan swasta (BUMS). Pemerintah di sebagian besar NSB menerapkan perencanaan seperti ini, walaupun kadang kala hanya untuk suatu cabang industri tertentu atau produk/jasa yang dianggap strategis. *Kelima*, penetapan sasaran untuk perekonomian secara keseluruhan dengan maksud untuk mengalokasikan semua tenaga kerja, devisa, bahan mentah dan sumber daya lainnya ke berbagai bidang perekonomian. *Keenam*, perencanaan kadang kala dipakai untuk menggambarkan sarana yang digunakan pemerintah untuk memaksakan sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya kepada badan usaha swasta.

Walaupun tidak ada kesepakatan di antara para ekonom berkenaan dengan istilah perencanaan ekonomi, sebagian besar ekonom menganggap perencanaan ekonomi mengandung arti *pengendalian dan pengaturan* perekonomian dengan sengaja oleh pemerintah pusat untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula (Lincoln Arsyad, 1993).

3.2. Fungsi Perencanaan Ekonomi

Sebagai alat mencapai sasaran yang lebih baik, fungsi-fungsi perencanaan dalam ekonomi adalah sebagai berikut :

- Penggunaan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas bias lebih efisien dan efektif sehingga dapat dihindari adanya pemborosan-pemborosan.

- Perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi mantap dan berkesinambungan.
- Stabilitas ekonomi tercapai dalam menghadapi siklus konjungtur.

3.3. Proses Perencanaan Ekonomi

Proses pembangunan biasa dibagi 4 tahap. Biasanya ke empat tahap tersebut ditetapkan dalam suatu rangkaian yang dimulai pada saat tujuan ditetapkan oleh pemimpin politik dan diterjemahkan ke dalam target kuantitatif untuk pertumbuhan, penciptaan kesempatan kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan seterusnya. Para pemimpin politik harus menetapkan prioritas-prioritas tujuan untuk mengarahkan para perencana jika terjadi beberapa konflik tujuan. Hasilnya adalah suatu fungsi kesejahteraan yang memberikan suatu ukuran apakah perencanaan (dan para perencana) akan memenuhi tujuan nasional atau tidak. Ukuran tersebut merupakan fungsi dan target-target tujuan yang biasanya cukup banyak jumlahnya. Umumnya orang menetapkan target kenaikan untuk suatu tujuan atau lebih. Alternatif ketiga adalah suatu kesejahteraan yang menunjukkan peringkat, yang membuat para perencana untuk melakukan pertimbangan, yang akhirnya lebih memprioritaskan pertumbuhan. Itulah biasanya yang dilakukan pada *tahap pertama* proses perencanaan ekonomi. *Tahap kedua* adalah mengukur ketersediaan sumber daya-sumber daya yang langka selama periode perencanaan tersebut.

Pada *tahap ketiga* hampir semua dari upaya ekonomi ditujukan untuk memilih berbagai cara yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Pada tahap ini ditetapkan proyek-proyek investasi yang semuanya itu bisa merangsang

perusahaan-perusahaan swasta untuk mengembangkan tujuan-tujuan pembangunan nasional, dan perubahan keuangan (perbankan) atau penataan kembali sektor pertanian, yang bisa mengurangi hambatan-hambatan untuk mengubah dan mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya.

Akhirnya, perencanaan mengerjakan proses pemilihan kegiatan-kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional (*welfare function*) tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala sumber daya dan organisasional. Hasil dari proses ini adalah strategi pembangunan (*development strategy*) atau rencana yang mengatur kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama beberapa tahun (biasanya 5 tahun) (Lincoln Arsyad, 1993).

3.4. Syarat-syarat Keberhasilan Suatu Perencanaan.

Menurut Jhingan (1983), perumusan dan kunci keberhasilan suatu perencanaan biasanya memerlukan adanya hal-hal berikut ini :

1. Komisi Perencanaan

Prasyarat pertama bagi suatu perencanaan adalah pembentukan suatu komisi (badan atau lembaga) perencanaan yang harus diorganisir dengan cara yang tepat. Komisi tersebut harus dibagi dalam bagian-bagian dan sub bagian yang di koordinir oleh para pakar, seperti pakar ekonomi, pakar statistik, pakar teknik, dan para pakar lainnya yang mengerti masalah perekonomian.

2. Data Statistik

Perencanaan yang baik membutuhkan adanya analisis yang menyeluruh tentang potensi sumberdaya yang dimiliki suatu negara

beserta kekurangannya. Analisis seperti ini penting untuk mengumpulkan informasi dan data statistik serta sumberdaya-sumberdaya potensial lain seperti sumberdaya alam.

3. Tujuan

Renacana dapat menetapkan pula tujuan-tujuan seperti halnya : peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita, pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan serta pemusatan kekuatan ekonomi, peningkatan produksi pertanian, industrialisasi, pembangunan kewilayahan yang berimbang, pencapaian swasembada pangan dan sebagainya.

4. Penetapan Sasaran dan Prioritas

Penetapan sasaran dan prioritas untuk pencapaian suatu tujuan perencanaan dibuat secara makro dan sektoral. Sasaran secara makro hendaknya dirumuskan secara tegas serta mencakup setiap aspek perekonomian dan dapat dikuantifikasikan. Untuk sasaran sektoral hendaknya disesuaikan dengan sasaran makronya, sehingga ada keserasian dalam pencapaian tujuan.

5. Mobilisasi Sumberdaya

Dalam perencanaan ditetapkan adanya pembiayaan oleh pemerintah sebagai dasar mobilisasi sumberdaya yang tersedia. Sumber pembiayaan ini bisa berasal dari sumber luar negeri dan dalam negeri (domestik). Sumber dana domestik yang utama didapatkan dari tabungan, laba perusahaan negara dan pajak. Sumber dana luar negeri

berasal dari pinjaman atau bantuan luar negeri dan penanaman modal asing.

6. Keseimbangan dalam Perencanaan

Suatu perencanaan hendaknya mampu menjamin keseimbangan dalam perekonomian, untuk menghindari kelangkaan maupun surplus pada periode perencanaan. Keseimbangan antara tabungan dan investasi, antara permintaan dan penawaran terhadap suatu produk, antara kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja dan antara devisa dan permintaan terhadap impor sangat diperlukan.

7. Sistem Administrasi yang Efisien

Administrasi yang baik, efisien dan tidak korup adalah syarat mutlak keberhasilan suatu perencanaan. Lewis menganggap administrasi yang kuat, baik dan tidak korup merupakan syarat utama bagi keberhasilan suatu perencanaan.

8. Kebijakan Pembangunan yang Tepat

Pemerintah harus menetapkan kebijaksanaan pembangunan yang tepat demi berhasilnya rencana pembangunan dan untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaannya.

9. Administrasi yang Ekonomis

Setiap usaha harus dibuat berdampak ekonomis dalam administrasi, khususnya dalam pengembangan bagian-bagian departemen dan pemerintahan.

10. Dasar Pendidikan

Administrasi yang bersih dan efisien memerlukan dasar pendidikan yang kuat. Perencanaan yang berhasil harus memperhatikan standar moral dan etika masyarakat.

11. Teori Konsumsi

Menurut Galbraith (1962), suatu syarat penting dalam perencanaan pembangunan modern adalah bahwa perencanaan tersebut harus dilandasi oleh teori konsumsi. Negara terbelakang tidak harus demokratis dan perhatian pertama harus diberikan kepada barang yang ada didalam peringkat pola pendapatan yang dapat dibeli oleh keluarga tertentu.

12. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat merupakan faktor penting bagi keberhasilan suatu perencanaan di dalam suatu Negara yang demokratis. Perencanaan ekonomi harus diatas kepentingan golongan, tetapi pada saat yang sama, perencanaan tersebut harus memperoleh persetujuan semua orang (Lincoln Arsyad, 1999).

3.5. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

3.5.1. Adam Smith (1723–1790)

Adam Smith ternyata bukan saja terkenal sebagai pelopor pembangunan ekonomi dan kebijaksanaan *laissez-faire*, tetapi juga merupakan ekonom pertama yang banyak menumpahkan perhatian kepada masalah pertumbuhan ekonomi. Dalam bukunya **An Inquiry into the**

Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) ia mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis.

Agar inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Smith ini mudah dipahami, kita bedakan dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu :

- **Pertumbuhan Output Total**

Menurut Smith, sumberdaya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumberdaya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumberdaya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Pengaruh stok modal menurut Smith terhadap tingkat output bisa secara langsung dan tak langsung. Pengaruh langsung maksudnya adalah karena penambahan modal (sebagai input) akan langsung meningkatkan output. Sedangkan pengaruh tak langsung maksudnya adalah peningkatan produktifitas per kapita yang dimungkinkan oleh karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih tinggi.

- **Pertumbuhan Penduduk**

Menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten

yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Tingkat upah yang berlaku, menurut Adam Smith, ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi dan meningkat jika permintaan akan tenaga kerja (D) tumbuh lebih cepat dari pada penawaran tenaga kerja.

3.5.2. Walt Whitman Rostow

Teori pembangunan dari Rostow ini sangat populer dan paling banyak mendapatkan komentar dari para ahli. Teori ini pada mulanya merupakan artikel Rostow yang dimuat dalam *Economics Journal* (Maret 1956) dan kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul *The Stages of Economic Growth* (1960). Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap yaitu masyarakat tradisional (*the traditional society*), prasyarat untuk tinggal landas (*the preconditions for take-off*), tinggal landas (*the take-off*), menuju kedewasaan (*the drive to maturity*), dan masa konsumsi tinggi (*the age of high mass-consumption*).

3.5.3. Friedrich List

List dipandang sebagai pelopor yang meletakkan landasan bagi pertumbuhan pemikiran ekonomi mahzab Historismus ini. Perkembangan ekonomi, menurut List, melalui 5 tahap yaitu tahap primitif, betemak, pertanian, pertanian dan industri pengolahan (*manufacturing*) dan akhirnya pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Pendekatan List dalam menentukan tahap-tahap perkembangan ekonomi tersebut berdasarkan pada

cara produksinya. Selain itu, List juga berpendapat bahwa daerah-daerah beriklim sedang paling cocok untuk pengembangan industri, karena adanya kepadatan penduduk yang sedang yang merupakan pasar yang cukup memadai. Sedangkan daerah tropis kurang cocok untuk industri karena pada umumnya daerah tersebut berpenduduk sangat padat dan pertanian masih kurang efisien.

3.5.4. Sir Roy F. Harrod – Evsey Domar (Harrod-Domar)

Menganalisis syarat yang diperlukan agar perekonomian tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Teori Harrod-Domar membagi dalam asumsinya, yaitu :

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
2. Perekonomian terdiri dari 2 sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada.
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
4. Kecenderungan untuk menabung (*Marginal Proporsity to Save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga rasio antara Modal-Output (*Capital-Output Ratio = COR*) dan rasio pertambahan Modal-Output (*Incremental Capital-Output Ratio = ICOR*).

Setiap perekonomian menurut Harrod-Domar dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika

untuk mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut diperlukan industri-industri baru sebagai tambahan stok modal. Rasio modal-output (COR) sebagai suatu hubungan antara investasi yang ditanamkan dengan pendapatan tahunan yang dihasilkan dari investasi tersebut (Lincoln Arsyad,1999).

3.6.Pembangunan Regional dan Sektoral

3.6.1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar yang baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

3.6.2. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah

- **Teori Neo Klasik**

Peranan teori ekonomi Neo Klasik tidak terlalu besar dalam menganalisis pembangunan daerah (*regional*) karena teori ini tidak memiliki dimensi spesial yang signifikan. Namun demikian, teori ini memberikan 2 konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju daerah yang berupah rendah.

- **Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*)**

Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*). Kelemahan model ini adalah bahwa model ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global. Namun demikian, model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara

jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi.

- **Teori Lokasi**

Para ekonom regional sering mengatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah yaitu : lokasi, lokasi, dan lokasi. Pernyataan tersebut sangat masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung untuk meminimumkan biayanya dengan cara memilih lokasi yang memaksimalkan peluangnya untuk mendekati pasar. Model pengembangan industri kuno menyatakan bahwa lokasi yang terbaik adalah biaya yang termurah antara bahan baku dengan pasar. Keterbatasan dari teori lokasi ini pada saat sekarang adalah bahwa teknologi dan komunikasi modern telah mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang.

- **Teori Tempat Sentral**

Teori tempat sentral (*central place theory*) menganggap bahwa ada hirarki tempat (*hierarchy of places*). Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan.

- **Teori Kausasi Kumulatif**

Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari tesis kausasi kumulatif (*cumulative causation*) ini. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut (maju versus terbelakang). Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah lainnya. Hal ini yang disebut Myrdal (1957) sebagai *backwash effects*.

- **Model Daya Tarik (*Attraction*)**

Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialisasi melalui pemberian subsidi.

3.6.3. Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Teori pembangunan yang ada sekarang ini (seperti yang diuraikan diatas) tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan dirumuskan disini untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah.

Pendekatan ini dapat disajikan pada tabel 3.1 ini :

Tabel 3.1
Paradigma Baru Teori Pembangunan Daerah

KOMPONEN	KONSEP LAMA	KONSEP BARU
Kesempatan kerja	Semakin banyak perusahaan = semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan uang sesuai dengan kondisi penduduk daerah
Basis Pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
Aset-aset Lokasi	Keunggulan komparatif didasarkan pada asset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumberdaya Pengetahuan	Ketersediaan Angkatan Kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

(Lincoln Arsyad, 1999:302)

3.6.4. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (*economic entity*) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain.

3.6.5. Perlunya Perencanaan Pembangunan Daerah

Setelah para ekonom menyadari bahwa mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat terutama di negara NSB, mereka mulai sadar bahwa campur tangan pemerintah

tetap diperlukan, apabila ingin mencapai proses pembangunan yang lebih cepat. Pentingnya campur tangan pemerintah, terutama dalam pembangunan daerah, dimaksudkan untuk mencegah akibat-akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati berbagai daerah yang ada. Keadaan sosial ekonomi yang berbeda dari setiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah.

3.6.6. Implikasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Ada 3 implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah :

Pertama, perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistis memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.

Kedua, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional.

Ketiga, perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah misalnya : administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada

tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu, perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan.

3.6.7. Tahap-tahap Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Blakely (1989) ada 6 tahap dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah seperti yang disajikan pada tabel 3.2.

Sementara itu, Bendavid-Val (1991) menyajikan suatu model tahap-tahap perencanaan yang sedikit agak berbeda dengan skema di atas. Pada bagan berikut ini ada 3 hal yang menarik :

1. Pengumpulan dan analisis data bukan merupakan suatu tahap dalam proses perencanaan secara keseluruhan, tetapi secara terus menerus berfungsi mendukung dan menyediakan informasi pada setiap tahap perencanaan.
2. Semua tahap dalam proses perencanaan merupakan bagian dari siklus dimana tujuan-tujuan secara periodik ditinjau kembali, sasaran-sasaran dirumuskan kembali, dan seterusnya.

3. Suatu rencana yang sudah disosialisasikan bukanlah merupakan akhir dari suatu proses, tetapi sesuatu yang dihasilkan dari waktu ke waktu untuk kepentingan-kepentingan praktis (Lincoln Arsyad, 1999).

Tabel 3.2
Tahapan dan Kegiatan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

TAHAP	KEGIATAN
I	Pengumpulan dan Analisis Data <ul style="list-style-type: none"> • Penentuan Basis Ekonomi • Analisis Struktur Tenaga Kerja • Evaluasi Kebutuhan Tenaga Kerja • Analisis Peluang dan Kendala Pembangunan • Analisis Kapasitas Kelembagaan
II	Pemilihan Strategi Pembangunan Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Penentuan Tujuan dan Kriteria • Penentuan Kemungkinan-kemungkinan Tindakan • Penyusunan Strategi
III	Pemilihan Proyek-proyek Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi Proyek • Penilaian Viabilitas Proyek
IV	Pembuatan Rencana Tindakan <ul style="list-style-type: none"> • Prapenilaian Hasil Proyek • Pengembangan Input Proyek • Penentuan Alternatif Sumber Pembiayaan Identifikasi
V	Penentuan Rincian Proyek <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Studi Kelayakan Secara Rinci • Penyiapan Rencana Usaha (<i>Business Plan</i>) • Pengembangan, Monitoring, dan Pengevaluasian Program
VI	Persiapan Perencanaan Secara Keseluruhan dan Implementasi <ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan Skedul Implementasi Rencana Proyek • Penyusunan Program Pembangunan Secara Keseluruhan • Targeting dan Marketing Aset-aset Masyarakat • Pemasaran Kebutuhan Keuangan

(Lincoln Arsyad, 1999:308)

3.7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

3.7.1. Pengertian PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Dengan demikian PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan lebih lanjut, perkembangan PDRB antara lain mencerminkan struktur ekonomi suatu daerah sekaligus memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat dan kemampuan daerah untuk menggali serta memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai tambah yang dihasilkan didalam satu region. Selanjutnya PDRB dapat diartikan menurut 3 pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan berbagai unit produksi dalam suatu wilayah/*region* pada suatu jangka waktu tertentu, biasanya setahun.
2. Pendekatan Pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi dalam suatu wilayah/*region* pada jangka waktu tertentu (setahun). Balas jasa faktor produksi tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga

modal, dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak tak langsung lainnya. Dalam pengertian Produk Domestik Bruto, selain komponen-komponen tersebut diatas termasuk pula penyusutan dan pajak tak langsung netto, jumlah semua komponen diatas per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto seluruh sektor lapangan usaha.

3. Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto di suatu wilayah/*region*. Ekspor neto disini adalah ekspor dikurangi neto.

Secara konsep, ketiga pendekatan tersebut memberikan jumlah yang sama antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya. PDRB diatas selanjutnya disebut PDRB atas dasar harga pasar, karena masyarakat mencakup komponen pajak tak langsung netto.

3.7.2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Adalah PDRB yang dinilai berdasarkan pada tahun berjalan baik pada saat menilai produksi, biaya antara maupun komponen nilai tambah. Penyajian PDRB atas dasar harga berlaku bertujuan untuk melihat besarnya nilai PDRB berdasarkan harga pada tahun tersebut.

Adapun metode perhitungannya dibagi menjadi dua metode, yaitu :

1. Metode Langsung

Perhitungan dengan metode langsung dilakukan berdasarkan :

- a. Pendekatan Produksi,
- b. Pendekatan Pendapatan dan
- c. Pendekatan Pengeluaran.

Dimana dari ketiga pendekatan tersebut akan memberikan hasil yang sama.

2. Metode Tidak langsung.

Dalam metode ini nilai tambah di suatu wilayah/region diperoleh dengan mengalokasikan nilai tambah suatu kegiatan ekonomi nasional kedalam masing-masing kegiatan ekonomi pada tingkat regional dengan menggunakan indikator yang mempunyai pengaruh paling erat dengan kegiatan ekonomi tersebut.

3.7.3. PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Adalah PDRB yang dinilai berdasarkan pada tahun dasar baik pada saat menilai produksi, biaya antara maupun nilai tambah. Penyajiannya bertujuan untuk melihat perkembangan nilai PDRB dari tahun ketahun yang semata-mata karena perkembangan riil, bukan disebabkan oleh kenaikan harga. Sedangkan metode perhitungan PDRB atas dasar harga konstan menilai produksi dan nilai tambah dengan harga pada tahun dasar, dengan demikian nilai PDRB ini dapat mencerminkan kenaikan riil nilai tambah tanpa dipengaruhi adanya perubahan harga.

3.7.4. Angka Laju Pertumbuhan PDRB

Angka Laju Pertumbuhan Produk Regional Bruto adalah besarnya persentase kenaikan PDRB pada tahun berjalan terhadap PDRB tahun sebelumnya.

3.7.5. Indeks Harga Implisit PDRB

Merupakan Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan.

3.7.6. Pendapatan Regional

Adalah PDRB ditambah balas jasa sektor produksi milik penduduk wilayah/region tersebut yang berasal dari luar dikurangi balas jasa faktor produksi yang mengalir keluar.

3.7.7. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan Regional dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sehubungan dengan perhitungan pendapatan yang benar-benar diterima oleh penduduk kabupaten Subang sulit dilakukan karena masih belum tersedianya arus pendapatan yang mengalir antar kabupaten. Dengan demikian angka PDRB ini merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan daerah tersebut untuk menghasilkan pendapatan (PDRB Kabupaten Subang, 2002).

3.8. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka dapat ditarik hipotesis yaitu :

1. Diduga sektor-sektor ekonomi kabupaten Subang tidak mengalami pergeseran.
2. Diduga sektor-sektor ekonomi kabupaten Subang mengalami pertumbuhan yang positif atau pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan propinsi Jawa Barat dengan sektor pertanian merupakan sektor yang paling besar dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB kabupaten Subang.

BAB IV

GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

4.1. Kondisi Geografis dan Keadaan Wilayah

4.1.1. Letak Geografis

Kabupaten Subang secara geografis terletak di bagian utara propinsi Jawa Barat yaitu antara 107^o 31'-107^o 54' Bujur Timur dan 6^o 11'-6^o 49' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayahnya :

- Sebelah Selatan, berbatasan dengan kabupaten Bandung.
- Sebelah Barat, berbatasan dengan kabupaten Purwakarta dan Karawang.
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah Timur, berbatasan dengan kabupaten Indramayu dan Sumedang.

4.1.2. Kondisi Wilayah

Luas wilayah kabupaten Subang adalah 205.176,95 hektar atau 6,34% dari luas propinsi Jawa Barat saat ini dengan ketinggian tempat antara 0-1500m dpl. Dilihat dari topografinya kabupaten dapat dibagi dalam tiga zona daerah, yaitu :

- Daerah pegunungan dengan ketinggian 500-1500m dpl dengan luas 41.035,09 hektar atau 20% dari seluruh luas wilayah kabupaten Subang.

- Daerah bergelombang/berbukit dengan ketinggian 50-500m dpl dengan luas wilayah 71.502,16 hektar atau 34,85 % dari seluruh luas wilayah kabupaten Subang.
- Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-50m dpl dengan luas 92.639,7 hektar atau 41,15% dari seluruh luas wilayah kabupaten Subang.

Apabila dilihat dari kemiringan lahan, maka tercatat bahwa 80,80% wilayah kabupaten Subang memiliki kemiringan 0° - 17° . Sedangkan sisanya memiliki kemiringan diatas 18° . Distribusi wilayah menurut kemiringan dan ketinggian tempat dapat dilihat pada tabel 4.1 dan 4.2 :

Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Klasifikasi Ketinggian Tempat
Di Kabupaten Subang Tahun 2002

Klasifikasi Ketinggian Tempat (Meter dpl)	Meliputi wilayah kecamatan	Luas (Hektar)	Persentase
0 – 25	Ciasem, Blanakan, Pusakanagara, sebagian Patokbeusi, sebagian Purwadadi, sebagian Cikaum, sebagian Pabuaran, Pamanukan, Legonkulon, Binong, dan Comprong.	55.398,48	27,00
26 – 50	Sebagian Pagaden, Cipunagara, sebagian Pabuaran, dan sebagian Purwadadi.	37.241,22	18,15
51 – 75	Sebagian Cipeundeuy, sebagian Purwadadi, sebagian Pagaden, sebagian Cikaum, sebagian Subang, dan sebagian Cibogo.	16.502,45	8,04
76 – 100	Sebagian Cipeundeuy, Kalijati, sebagian Subang, sebagian Cibogo, dan sebagian Cijambe.	13.964,32	6,81
101 – 500	Sebagian Cipeundeuy, sebagian Sagalaherang, sebagian Kalijati, sebagian Subang, sebagian Cijambe, sebagian Cisalak, sebagian Jalancagak, dan sebagian Tanjungsiang.	41.035,39	20,00
501 – 1000	Sebagian Sagalaherang, sebagian Jalancagak, sebagian Cisalak, dan sebagian Tanjungsiang.	12.310,42	6,00
>1000	Sebagian Sagalaherang, sebagian Jalancagak, sebagian Cisalak, dan sebagian Tanjungsiang.	28.742,67	14,00
Jumlah		205.176,950	100,00

Sumber : BPS, Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Subang.

Tabel 4.2
Luas Wilayah Menurut Klasifikasi Kemiringan Lereng
Di Kabupaten Subang Tahun 2002

Klasifikasi Kemiringan Tanah	Meliputi Wilayah	Luas (Hektar)	Persentase
0 ^o - 17 ^o	Kabupaten Subang bagian utara hingga tengah. Mulai dari pantai utara hingga Kalijati. Subang dan Cibogo ditambah sebagian kecil Jalancagak dan Tanjungsiang.	165.793,03	80,80
18 ^o - 45 ^o	Wilayah Subang selatan bagian tengah yang meliputi Kalijati, Subang, dan Cibogobagian selatan ditambah sebagian Sagalaherang, sebagian Cisalak, dan Cijambe.	21.827,32	10,64
>45 ^o	Sebagian kecamatan Sagalaherang, sebagian Cisalak, sebagian Jalancagak, dan sebagian besar Tanjungsiang.	17.556,60	8,56
Jumlah		205.176,95	100,00

Sumber : BPS, Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Subang.

4.1.3. Kondisi Kependudukan

Pembangunan kependudukan baik kuantitas maupun kualitas di kabupaten Subang merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah, karena penduduk merupakan sumber daya utama pembangunan baik sebagai objek maupun subjek pembangunan. Selain sumber daya alam dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) adalah jumlah penduduk atau Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam pembangunan yang dibutuhkan adalah SDM yang secara kuantitas mencukupi dan secara kualitas dapat diandalkan atau dengan kata lain SDM yang siap pakai. Jika dalam suatu wilayah tersedia SDM yang cukup baik secara kuantitas maupun secara kualitas, maka dengan dukungan modal pembangunan yang lain, segala program pembangunan diberbagai sektor pada wilayah tersebut akan dapat terlaksana dengan baik.

Pembangunan kependudukan bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam meningkatkan kualitas penduduk yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk/rakyat banyak.

Penduduk kabupaten Subang tahun 2002 berjumlah 1.341.129 orang, dengan komposisi 666.372 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan 674.757 orang dengan jenis kelamin perempuan. Tingkat kepadatan mencapai 653,65 jiwa per Km². Kecamatan Subang masih merupakan daerah terpadat yaitu 1.392,79 jiwa per Km² disusul kecamatan Pamanukan 1.033,03 jiwa per Km². Sedangkan kecamatan Legonkulon merupakan daerah yang paling rendah tingkat kepadatannya yaitu 388,66 jiwa per Km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3.

Salah satu indikator yang dapat menunjukkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin pada suatu daerah, pada suatu waktu tertentu adalah rasio jenis kelamin atau (*sex ratio*), rasio jenis kelamin memperlihatkan banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Tahun 2002 kabupaten Subang memiliki rasio jenis kelamin sebesar 98,76.

Tabel 4.3
Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk Hasil Registrasi
Menurut Kecamatan di Kabupaten Subang Akhir Tahun 2002

KECAMATAN	DESA / KEL	RUMAH TANGGA	PENDUDUK		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
01. SAGALAHERANG	13	15.068	24.229	24.450	48.679
02. JALANCAGAK	17	21.546	36.136	36.755	72.891
03. CISALAK	13	14.016	24.504	24.846	49.350
04. TANJUNGSANG	11	13.481	21.160	22.003	43.163
05. CIJAMBE	8	11.181	18.415	18.196	36.611
06. CIBOGO	7	8.016	14.165	14.203	28.368
07. SUBANG	11	32.323	57.892	57.556	115.448
08. KALIJATI	16	21.872	35.656	35.829	71.485
09. CIPEUNDEUY	7	11.159	19.241	19.568	38.809
10. PABUARAN	11	19.507	34.142	34.093	68.235
11. PATOKBEUSI	10	20.677	35.432	35.288	70.720
12. PURWADADI	11	15.570	26.252	27.202	53.454
13. CIKAUM	10	13.801	22.479	24.029	46.508
14. PAGADEN	17	25.365	38.462	39.625	78.087
15. CIPUNAGARA	10	17.343	28.399	29.279	57.678
16. COMPRENG	8	11.950	21.229	22.151	43.380
17. BINONG	17	24.372	39.285	38.515	77.800
18. CIASEM	10	27.026	49.592	49.517	99.109
19. PAMANUKAN	14	24.902	41.962	41.600	83.562
20. PUSAKANAGARA	12	17.824	30.731	31.681	62.412
21. LEGONKULON	10	11.385	19.205	19.066	38.271
22. BLANAKAN	9	16.573	27.804	29.305	57.109
JUMLAH	252	394.957	666.372	674.757	1.341.129
TAHUN 2001	250	394.608	663.286	671.302	1.334.588
TAHUN 2000	250	346.055	615.448	629.718	1.245.166
TAHUN 1999	250	339.684	613.373	627.277	1.240.650
TAHUN 1998	250	339.231	611.715	625.636	1.237.351

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang

Dari tabel dibawah ini dapat dilihat komposisi kelompok umur, penduduk kabupaten Subang terdiri dari 27,41% usia anak-anak (0-14 tahun), 9,23% usia remaja (15-19 tahun), 33,35% usia muda (20-39 tahun) dan 30,01% usia tua dan lansia.

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Subang Tahun 2002

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
00 - 04	59.737	68.823	128.560
05 - 09	57.312	66.079	123.391
10 - 14	58.477	57.145	115.622
15 - 19	65.002	58.773	123.775
20 - 24	52.413	59.216	111.629
25 - 29	56.893	62.468	119.362
30 - 34	54.864	55.203	110.068
35 - 39	52.080	54.099	106.178
40 - 44	49.821	46.188	96.010
45 - 49	40.600	35.296	75.896
50 - 54	33.742	29.485	63.227
55 - 59	22.582	20.510	43.092
60 +	62.848	61.473	124.321
JUMLAH	666.372	674.757	1.341.129

Sumber : BPS Kabupaten Subang. (Hasil Registrasi Penduduk)

4.1.4. Kondisi Ketenagakerjaan

Tingkat partisipasi angkatan kerja didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (berusia 10 tahun keatas). Angkatan kerja mencakup penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah perbandingan antara penduduk yang mencari pekerjaan dengan angkatan kerja.

Pada tahun 2002 TPAK di kabupaten Subang adalah sebesar 57,40% dan sejumlah penduduk usia kerja, naik sebesar 2,96% dari tahun 2001. Sedangkan TPT ada sebesar 6,12% (naik sebesar 3,16%).

Dari hasil Susenas 2002, penduduk usia 10 tahun keatas yang bekerja di kabupaten Subang berjumlah sebanyak 581.097 jiwa. Lapangan pekerjaan pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan dalam

menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2002 sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebesar 51.30% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut
Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Subang
Tahun 2000-2002

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	2000		2001		2002	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1. Pertanian	303.125	54,02	327.050	57,42	298.098	51,30
2. Pertambangan & Penggalian	1.221	0,22	862	0,15	2.138	0,38
3. Industri Pengolahan	28.807	5,13	38.331	6,37	45.541	7,84
4. Listrik, Gas, & Air Minum	1.624	0,29	431	0,08	-	-
5. Bangunan/Konstruksi	20.363	3,63	23.691	4,16	28.326	4,87
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	131.354	23,41	107.244	18,83	111.928	19,26
7. Perhubungan dan Komunikasi	36.099	6,43	27.135	4,76	16.737	8,04
8. Bank dan Lembaga Keuangan	2.025	0,36	4.308	0,76	3.518	0,61
9. Jasa-jasa	36.495	6,51	40.457	7,11	44.766	7,70
10. Lainnya	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	561.131	100,00	559.527	100,00	581.097	100,00

Sumber : BPS kabupaten Subang (Hasil Susenas)

Tingginya lapangan pekerjaan di sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja ini karena lapangan pekerjaan di sektor pertanian tidak membutuhkan tenaga terdidik dan terampil.

Sedangkan pada tabel 4.6 untuk jumlah pencari kerja menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan yang ditamatkan di kabupaten Subang pada tahun 2002 sebesar 8.021 orang jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan pada tahun 2001 yang berjumlah 9.196 orang (mengalami penurunan sebesar 1.175 orang). Jumlah pencari kerja yang paling banyak

yaitu pencari kerja dengan tingkat pendidikan SLTP dan sederajat yaitu sebesar 2.578 orang atau 32,14%.

Tabel 4.6
Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Jenis Kelamin
Dan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan
di Kabupaten Subang Tahun 2002

PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	BANYAKNYA			
	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1. Tidak tamat SD	-	-	-	-
2. SD dan Sederajat	185	402	587	7,32
3. SLTP dan Sederajat	1.089	1.499	2.578	32,14
4. SMU	1.002	1.015	2.017	25,15
5. Sekolah Menengah Kejuruan	798	1.221	2.019	25,17
6. Diploma I	45	91	136	1,70
7. Diploma II	23	42	65	0,81
8. Diploma II/Sarjana Muda	98	107	215	2,68
9. Diploma IV/S1 keatas	307	97	404	5,04
JUMLAH	3.547	4.474	8.021	100,00

Sumber : BPS, Depnaker kabupaten Subang

Pada tabel 4.7 jumlah lowongan kerja yang terdaftar menurut lapangan usaha di kabupaten Subang dapat dilihat dari tahun 1998-1999 mengalami penurunan sebesar 1.027 lowongan, kemudian pada tahun 2000 pun mengalami penurunan sebesar 788 lowongan, diperparah lagi dengan kondisi pada tahun 2001 yang hanya terdapat lowongan sebanyak 483 lowongan, namun pada tahun 2002 mengalami kenaikan sebesar 39 lowongan namun hanya dari 3 sektor saja yaitu sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor pertanian dan sektor

angkutan mulai dari tahun 1999 sampai 2002 tidak terdapat lagi lowongan.

Tabel 4.7
Jumlah Lowongan Kerja Yang Terdaftar Menurut Lapangan Usaha
Di Kabupaten Subang 1998-2002

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	1998	1999	2000	2001	2002
1. Pertanian	24	-	-	-	-
2. Pertambangan	-	-	-	-	-
3. Industri	475	474	250	335	402
4. Bangunan/Kontruksi	-	-	-	-	-
5. Listrik, Uap, Gas, dan Air	-	-	-	-	-
6. Perdagangan	55	2	-	58	15
7. Angkutan	7	-	-	-	-
8. Jasa-jasa	2.058	1.316	554	90	107
9. Keuangan dan Lainnya	-	-	-	-	-
JUMLAH	2.619	1.592	804	483	522

Sumber : BPS, Depnaker kabupaten Subang

4.2. Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Barat

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2002 sebesar 3,93%, percepatannya sedikit meningkat jika dibandingkan terhadap tahun 2001 yang sebesar 3,89% walaupun belum setinggi pada tahun 2000 yang mencapai 4,15 %. Bila dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya di Jawa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat cukup optimis. LPE propinsi DKI Jakarta pada tahun yang sama tumbuh sebesar 3,74%, DIY 3,74%, sementara propinsi lainnya mengalami pertumbuhan yang lebih rendah lagi, Jawa Timur hanya mencapai 3,01%, sedangkan Jawa Tengah 3,46%.

Sektor pertanian pada tahun 2002 mengalami pertumbuhan negatif 5,20%, menurun tajam dari tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan mencapai 3,11%. Hal ini lebih disebabkan oleh kemarau panjang yang terjadi sepanjang tahun. Pertumbuhan terjadi juga pada tahun 2000 yaitu sebesar -7,71%.

Pertumbuhan negatif pada tahun 2002 disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan yang merupakan kontributor terbesar sektor ini sebesar 9,24%. Disamping itu subsektor kehutanan juga mengalami pertumbuhan negatif 23,20%. Sebaliknya pertumbuhan positif 14,83%, 11,10% serta 10,51%.

Sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2002 mengalami pertumbuhan negatif 4,50 %, setelah sebelumnya bertumbuh negatif 6,14 % demikian pula pada tahun 2000 bertumbuh negatif 3,40 %. Subsektor pertambangan minyak dan gas bumi bertumbuh negatif 4,73 %, demikian juga dengan subsektor penggalian bertumbuh -1,71 %. Sebaliknya subsektor pertambangan tanpa migas bertumbuh positif 14,95 %.

Sektor industri yang selama ini menjadi salah satu andalan perekonomian Jawa Barat tumbuh 3,16 %, angka ini mengalami pelambatan dibandingkan tahun 2001 yang sebesar 9,58 %. Hal ini diduga disebabkan oleh dampak instabilitas politik domestik dan fluktuatifnya nilai kurs. Sementara itu daya beli masyarakat melemah karena dipacu oleh naiknya harga barang dan jasa yang tergolong *adminiterd price* seperti BBM dan TDL. Bahkan pada triwulan akhir tahun 2002 terjadi bencana ledakan bom di Bali yang menyebabkan guncangan yang cukup signifikan bagi dunia usaha terutama sektor industri dan perdagangan.

Sektor listrik, gas dan air bersih walaupun mencapai pertumbuhan di atas rata-rata yaitu sebesar 8,02 % pada tahun 2002, namun jika dibandingkan pertumbuhan tahun 2001 terjadi peningkatan pertumbuhan 6,61 %. Tapi jika dibandingkan terhadap pertumbuhan 2000 masih lebih rendah yaitu mencapai 16,43 %. Kontribusi subsektor listrik yang cukup dominan mempunyai

pertumbuhan yang relatif tinggi yaitu sebesar 8,03 %, diikuti sub sektor air bersih dengan 8,97 %, kemudian gas kota bertumbuh 0,10 %.

Sektor bangunan pada tahun 2002 mengalami pertumbuhan positif mencapai 8,37 %, setelah pada tahun 2001 mengalami pertumbuhan negatif 1,56 %. Jika dicermati pertumbuhannya pada tahun 2000 mencapai 10,28 %. Di lain pihak, sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan positif 8,51 %, jika dibandingkan terhadap tahun 2001 sektor ini tumbuh 3,93 % dan pada tahun 2000 tumbuh 1,14 %. Pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2002 lebih disebabkan oleh pertumbuhan subsektor perdagangan yang mencapai 10,59 %. Subsektor perdagangan merupakan kontributor utama sektor perdagangan, hotel dan eceran. Subsektor hotel dan restoran pada tahun 2002 masing-masing mengalami pertumbuhan 4,84 % dan 0,98 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.8.

Pertumbuhan sektor ekonomi dan komunikasi pada tahun 2002 masih diatas rata-rata LPE yaitu 11,43 %. Dalam sektor ini, subsektor angkutan rel (kereta api) tumbuh cukup signifikan, tahun 2000 hanya -13,00 %, dan mencapai 3,43 % pada tahun 2001 kemudian pada tahun 2002 mencapai 6,19 %. Di lain pihak subsektor angkutan laut kembali mengalami pelambatan LPE sebesar -1,08 % pada tahun 2002, setelah pada tahun 2001 pertumbuhan -16,73 %. Sementara pada tahun 2000 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 11,42 %. Subsektor angkutan udara pada tahun 2002 mengalami pertumbuhan positif 14,90 %, padahal pada tahun 2001 pun mengalami pertumbuhan positif mencapai 36,96 %. Subsektor jasa penunjang angkutan dan subsektor komunikasi

pada tahun 2002 mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 2,80 % dan 13,00 %.

Pertumbuhan sektor keuangan kembali melambat, pada tahun 2000 bertumbuh 18,16 % tetapi pada tahun 2001 hanya 10,99 %, pada tahun 2002 sebesar 10,07 %. Seluruh subsektor pada sektor keuangan mengalami pertumbuhan positif yaitu : Bank 19,77 %, Lembaga keuangan lainnya 10,58 %, Sewa bangunan 9,28 % dan jasa perusahaan 2,03 %.

Sektor jasa-jasa pada tahun 2002 mengalami pertumbuhan positif 8,52 %. Jika dicermati pertumbuhannya pada tahun 2000 sebesar -1,57 % dan pada tahun 2001 sebesar 3,90 %. Subsektor pemerintahan umum dan swasta masing-masing bertumbuh 10,06 % dan 6,65 %.

Tabel 4.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat
Menurut Sektor Tahun 2000 - 2002

Sektor	2000	2001	2002
1. Pertanian	-7,71	3,11	-5,20
2. Pertambangan	-3,40	-6,14	-4,50
3. Industri	9,58	4,92	3,16
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	16,43	6,61	8,02
5. Bangunan	10,28	-1,56	8,37
6. Perdagangan	1,14	3,93	8,51
7. Pengangkutan	11,73	6,70	11,43
8. Keuangans	18,16	10,99	10,07
9. Jasa-jasa	-1,57	3,90	8,52
PDRB	4,15	3,89	3,93

Sumber : BPS, Tinjauan Ekonomi Propinsi Jawa Barat Tahun 2002

4.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Subang

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi yang dipakai dalam mengukur perkembangan/pertumbuhan ekonomi suatu daerah, begitu pula di kabupaten Subang. Indikator ini menunjukkan meningkat tidaknya

produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang ada di daerah tersebut. Berikut ini dapat dilihat LPE kabupaten Subang per sektor tahun 2001-2002 pada tabel 4.9.

Tabel 4.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Subang Per Sektor
Tahun 2001-2002 (dalam %)

SEKTOR	2001	2002
1. Pertanian	-0,75	2,21
2. Pertambangan dan Penggalian	-7,40	1,64
3. Industri Pengolahan	2,01	1,42
4. Listrik dan Air Bersih	8,67	6,10
5. Bangunan/Konstruksi	1,00	8,70
6. Perdagangan, Hotel, Restoran	4,95	8,20
7. Pengangkutan dan Komunikasi	14,31	7,50
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	8,04	3,89
9. Jasa-jasa	13,53	2,96
PDRB DENGAN MIGAS	4,40	4,54
PDRB TANPA MINYAK	4,47	4,52

Sumber : BPS, PDRB kabupaten Subang

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pada sektor pertanian yang merupakan andalan kabupaten Subang hanya tumbuh 2,21 % tahun 2002, dan mengalami pertumbuhan yang cukup apabila dibandingkan dengan tahun 2001 yang tumbuh -0,75 %. Hal-hal yang menyebabkan sektor ini tumbuh hanya 2,21 % antara lain, berkurangnya luas panen untuk tanaman padi dan terdapatnya hama yang menyerang tumbuhan buah-buahan sehingga menurunkan produksi pertanian. Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan angka positif yaitu sebesar 1,64 % untuk tahun 2002, hal ini disebabkan banyaknya perusahaan penggalian yang tutup karena tidak memperhatikan kelestarian lingkungan serta infrastruktur lainnya. Industri pengolahan walaupun mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2002 sebesar 1,42 %, tetapi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan yang lebih kecil,

yang disebabkan menurunnya atau banyak industri-industri kecil kecil tutup sebagai akibat tingginya biaya produksi. Pertumbuhan sektor bangunan cukup signifikan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2002 tumbuh sebesar 8,70%, sedangkan tahun 2001 sebesar 1,00 %, keadaan tersebut sebagai pengaruh dari pembangunan fisik kabupaten Subang. Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi berada diatas rata-rata yaitu sebesar 7,50. Kemudian pada sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan tumbuh 3,89 % untuk tahun 2002, turun jika dibandingkan dengan tahun 2001 yang tumbuh sebesar 8,04 %, hal ini disebabkan pada tahun 2002 masyarakat lebih banyak meminjam uang ke lembaga bukan bank karena kemudahan prosedur apabila dibandingkan dengan meminjam ke bank. Yang terakhir yaitu sektor jasa-jasa tumbuh di bawah rata-rata LPE yaitu sebesar 2,96 %, terjadi penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2001 yang tumbuh sebesar 13,53 %.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber penerbitan, seperti data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) dan sumber-sumber lain yang terkait dan relevan dengan objek yang diteliti dimulai dari tahun 1993 hingga tahun 2002. Data tersebut adalah data pendapatan sektor-sektor ekonomi daerah yang tercermin dalam PDRB kabupaten Subang tahun 1993-2002 atas dasar harga konstan 1993. Dan pendapatan sektor-sektor ekonomi propinsi Jawa Barat yang tercermin dalam PDRB tahun 1993-2002 atas dasar harga konstan 1993.

Data tersebut akan digunakan untuk menganalisis pertumbuhan pertambahan pertumbuhan 9 sektor ekonomi kabupaten Subang dibandingkan 9 sektor propinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis *Shift-Share (S-S)*. Pada analisis *Shift-Share (S-S)* data yang digunakan sesuai dengan data teknik analisis tersebut adalah hanya menggunakan data PDRB kabupaten Subang dan PDRB propinsi Jawa Barat menurut sektor (lapangan kerja) dengan awal tahun analisis yaitu tahun 1993 dan akhir tahun yaitu tahun 2002. Untuk lebih jelas mengenai data tersebut dapat dilihat pada tabel 5.1 dan tabel 5.2 berikut ini :

Tabel 5.1
PDRB KABUPATEN SUBANG
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 PER SEKTOR
TAHUN 1993-2002 (JUTAAN RUPIAH)

No	Sektor	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
1	Pertanian	567.742	602.717	639.748	677.066	683.588	674.626	691.916	710.404	715.732	731.574
2	Penggalian	1.696	1.727	1.952	2.194	2.449	1.622	1.464	1.483	9.721	9.880
3	Industri Pengolahan	110.409	115.384	121.446	127.895	127.382	90.775	87.289	89.728	91.533	92.832
4	Listrik dan Air Bersih	4.483	5.151	6.559	9.102	9.881	10.977	12.373	14.792	17.804	18.890
5	Bangunan / Konstruksi	71.079	75.712	83.490	93.166	97.307	62.201	60.564	61.927	62.547	67.988
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	379.317	402.055	432.075	456.825	490.561	466.737	482.255	506.163	531.200	574.767
7	Pengangkutan dan Komunikasi	27.240	29.459	34.426	42.678	45.672	48.359	49.254	54.237	62.000	66.651
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	30.501	31.482	33.429	36.009	39.570	24.433	24.457	26.562	28.697	29.813
9	Jasa-jasa	185.908	189.898	199.877	213.794	226.007	219.162	225.715	237.217	269.306	277.269
	TOTAL	1.378.375	1.453.585	1.553.002	1.667.729	1.722.417	1.598.892	1.635.276	1.702.513	1.788.539	1.869.664

Sumber : BPS, PDRB kabupaten Subang Berbagai Terbitan diolah

Tabel 5.2
PDRB PROPINSI JAWA BARAT
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 PER SEKTOR
TAHUN 1993-2002 (JUTAAN RUPIAH)

No	Sektor	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
1	Pertanian	9.107.764	8.989.698	9.350.686	9.383.964	8.675.504	8.013.996	9.098.516	9.422.440	8.087.029	7.666.223
2	Penggalian	3.761.707	3.538.119	3.464.618	3.588.869	3.624.037	2.912.315	2.142.073	2.071.578	3.237.481	3.126.111
3	Industri Pengolahan	15.948.243	18.142.182	20.810.291	23.411.801	26.310.836	20.913.548	21.029.934	22.189.452	22.908.171	23.631.807
4	Listrik dan Air Bersih	1.169.776	1.303.723	1.390.037	1.633.677	1.859.827	1.816.765	2.046.564	2.432.778	1.919.108	2.072.936
5	Bangunan / Konstruksi	3.220.480	3.558.630	3.847.812	4.298.221	4.202.306	2.262.253	2.210.240	2.408.267	1.875.250	2.032.148
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	9.919.222	10.797.261	11.577.618	12.552.514	13.511.208	11.565.563	11.968.042	12.268.739	9.499.500	10.308.097
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3.080.943	3.314.599	3.569.072	3.844.345	3.908.369	3.497.994	3.555.871	3.957.045	2.890.102	3.220.583
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	2.546.718	2.836.519	3.019.396	3.157.865	3.666.643	2.189.229	2.369.171	2.685.593	2.470.843	2.719.727
9	Jasa-jasa	5.184.820	5.342.375	5.461.635	5.651.045	5.810.194	5.676.177	5.780.294	5.713.687	4.901.359	5.319.150
	TOTAL	53.939.673	57.823.106	62.491.165	67.522.301	71.568.924	58.847.841	60.200.705	63.149.580	57.788.843	60.096.782

Sumber : BPS, PDRB propinsi Jawa Barat Berbagai Terbitan diolah

Keterangan simbol-simbol analisa kuantitatif :

- r_{ij} :Laju pertumbuhan sektor i di wilayah j (kabupaten), {membagi nilai masing-masing tahun dengan nilai pada tahun sebelumnya dikalikan 100, kemudian dikurangi dengan 100, pada sektor i di wilayah j (kabupaten)}.
- r_{in} :Laju pertumbuhan sektor i di wilayah n (propinsi), {membagi nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun sebelumnya dikalikan 100, kemudian dikurangi dengan 100, pada sektor i di wilayah n (propinsi) }.
- r_n :Laju pertumbuhan ekonomi di wilayah n (propinsi), {membagi nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun sebelumnya dikalikan 100, kemudian dikurangi 100, pada PDRB di wilayah n (propinsi) }.
- N_{ij} :Merupakan perubahan sektor i di wilayah j , apabila pertumbuhannya sama besarnya dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi di tingkat propinsi. Apabila di wilayah j (kabupaten) mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dari pertumbuhan propinsi maka wilayah tersebut mengalami *Shift LOSS* (kerugian) sektor i di wilayah j .
- M_{ij} :Merupakan pengaruh industri yang selanjutnya disebut sebagai *Proporsional Shift* atau bauran komposisi dimana apabila M_{ij} mempunyai tanda positif (+) berarti bahwa variabel yang dianalisis mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dari pertumbuhan keseluruhan, demikian sebaliknya bila mempunyai tanda negatif (-) maupun nol.
- C_{ij} :Merupakan keunggulan kompetitif sektor i di wilayah j (kabupaten) atau disebut sebagai *Differential Shift* atau *Regional Share*. Apabila bertanda positif (+) berarti sektor i mempunyai kecepatan untuk tumbuh

dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat propinsi, atau dapat dinyatakan pula bahwa *Share* suatu wilayah atas pendapatan ekonomi nasional pada sektor tertentu mengalami peningkatan. Apabila bertanda negatif (-) berarti bahwa sektor *i* mempunyai kecenderungan menghambat pertumbuhan dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat propinsi.

- Y^*j : *Employment* atau output atau pendapatan atau nilai tambah yang dicapai suatu sektor di wilayah *j* (kabupaten).
- Y_{ij} : PDRB sektor *i* di wilayah *j* (kabupaten).
- Y_{in} : PDRB sektor *i* di wilayah *n* (propinsi).
- Y_n : Output yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dari satu *region*, baik berupa barang dan jasa di nilai dengan harga pada tahun 1993 pada wilayah *n* (propinsi).
- *
- D : Variabel wilayah/daerah seperti : nilai tambah, pendapatan dan atau output selama kurun waktu tertentu.

5.2 Hasil Perhitungan

5.2.1. Tahun 1993-2002

Tabel 5.3
Hasil Analisis Shift-Share Sektor-sektor Ekonomi
Kabupaten Subang Tahun 1993-2002
(Jutaan Rupiah)

No	Sektor	Komponen Pertumbuhan Propinsi (Nij)	Komponen Bauran Industri (Mij)	Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij)	Jumlah Keseluruhan (Dij)
1.	Pertanian	64.806,65	25.053,32	253.691,96	343.551,93
2.	Pertambangan dan Penggalian	193,59	-480,16	8.470,56	8.183,99
3.	Industri Pengolahan	12.602,97	40.590,01	-70.769,98	-17.577,00
4.	Listrik, gas, dan Air Bersih	511,72	2.949,51	10.945,76	14.406,99
5.	Bangunan	8.113,53	-34.341,13	-34.341,59	-3.091,01
6.	Perdagangan, hotel, dan Restoran	43.298,29	28.427,49	180.579,18	195.449,98
7.	Angkutan dan Komunikasi	3.109,39	-1.847,77	38.176,38	39.411,00
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Prsh	3.481,63	-1.409,57	-2.760,05	-687,99
9.	Jasa-jasa	21.221,03	-16.404,47	86.544,43	91.360,99
	Total	144.862,13	42.537,23	470.536,65	671.008,88

Sumber : BPS kabupaten Subang diolah

Pada hasil Perhitungan Analisis *Shift-Share* Kabupaten Subang tahun 1993-2002 terlihat pengaruh Komponen Pertumbuhan Propinsi (Nij) mempunyai efek yang positif sebesar Rp 144.862,13 juta, sektor yang mengalami pertumbuhan sangat besar yaitu sektor pertanian sebesar Rp 64.806,65 juta, hal ini disebabkan karena hasil panen yang stabil dan tidak mengalami masalah.

Komponen Bauran Industri (Mij) mempunyai efek positif terhadap PDRB, sebesar Rp 42.537,43 juta dengan sektor yang mempunyai nilai positif tertinggi dan mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dari pertumbuhan keseluruhan yaitu sektor industri pengolahan sebesar Rp 40.590,01 juta. Hal ini disebabkan meningkatnya industri-industri kecil di kabupaten Subang.

Apabila diamati dari aspek Keunggulan Kompetitif (Cij) sektor-sektor yang memberikan efek kompetitif positif paling tinggi adalah sektor pertanian sebesar Rp 253.691,96 juta, yang disebabkan karena meningkatnya jumlah dari hasil panen atau dikarenakan hasil panen yang meningkat, yang mengandung arti bahwa sektor ini mempunyai kecepatan untuk tumbuh dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat propinsi. Dan yang memberikan efek kompetitif negatif atau mempunyai kecenderungan menghambat pertumbuhan dengan sektor yang sama di tingkat propinsi adalah sektor bangunan sebesar Rp -34.341,59 juta, namun secara keseluruhan memberikan efek positif terhadap PDRB sebesar Rp 470.536,65 juta.

Secara keseluruhan (Dij) tingkat pertumbuhan pendapatan sektor-sektor ekonomi kabupaten Subang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap PDRB yaitu sebesar Rp 671.008,88 juta. Sektor yang menjadi *Leading Sector* yaitu sektor pertanian, karena sumbangannya untuk propinsi paling tinggi dibandingkan sektor-sektor yang lain sebesar Rp 343.551,93 juta, hal ini terjadi karena pada setiap komponen, sektor pertanian selalu mempunyai nilai yang sangat tinggi, yang disebabkan oleh keberhasilan para petani dalam mengelola hasil taninya.

5.2.2. Tahun 1993-1994

Hasil Perhitungan Analisis *Shift-Share* Kabupaten Subang berdasarkan tabel 5.6 (lihat lampiran) terlihat pengaruh pertumbuhan propinsi (Nij) mempunyai efek yang positif terhadap PDRB kabupaten Subang, yaitu

sebesar Rp 99.237,27 juta. Dan sektor yang paling besar perannya yaitu sektor pertanian sebesar Rp 40.875,07 juta, seperti tahun sebelumnya penyebabnya adalah karena keberhasilan para petani dalam mengelola lahan garapannya dan penyebab yang kedua yaitu masih stabilnya luas panen untuk tanaman padi. Seluruh sektor menunjukkan angka positif artinya sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang tinggi pada pendapatan propinsi.

Bila diamati pada Komponen Bauran Industri (Mij) ternyata mempunyai efek yang negatif sebesar Rp -38.760,97 juta, dengan sektor pertanian yang menunjukkan pengaruh negatif sebesar Rp -48.234,84 hal ini mengandung arti bahwa *Proprsional Shift* mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih lambat dari pertumbuhan keseluruhan, yang disebabkan karena sektor pertanian tidak berpengaruh terhadap Komponen Bauran Industri dan karena hasil panen yang rendah.

Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij) yang memberikan efek positif yang paling besar yaitu sektor pertanian sebesar Rp 42.334,74 juta, namun angka ini tidak terlalu besar dibandingkan tahun analisis sebelumnya, tetapi tetap saja sektor tersebut mempunyai kecepatan untuk tumbuh dibandingkan sektor yang sama di tingkat propinsi. Kemudian sektor yang mempunyai pengaruh negatif terbesar yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp -10.838,77 juta yang cenderung menghambat pertumbuhan dibandingkan sektor yang sama di tingkat propinsi, yang disebabkan oleh menurunnya jasa-jasa yang dikelola perorangan dan swasta.

Dan secara keseluruhan mempunyai pengaruh positif sebesar Rp 35.169,69 juta.

Secara keseluruhan (Dij) tingkat pertumbuhan pendapatan sektor-sektor ekonomi kabupaten Subang mempunyai efek yang positif terhadap PDRB sebesar Rp 95.645,99 juta. Yang menjadi *Leading Sector* yaitu sektor pertanian karena mempunyai peranan dalam sumbangannya terhadap propinsi yang sangat tinggi sebesar Rp 34.974,97 juta. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya hasil panen di kabupaten Subang.

5.2.3. Tahun 1994-1995

Hasil Perhitungan Analisis *Shift-Share* Kabupaten Subang pada tabel 5.7 (lihat lampiran) terlihat pada Komponen Pertumbuhan Propinsi (Nij) secara keseluruhan semua sektor mempunyai efek positif terhadap PDRB kabupaten Subang sebesar Rp 117.347,89 juta dan sektor yang besar peranannya yaitu sektor pertanian sebesar Rp 48.657,34 juta, yang disebabkan oleh hasil panen yang berhasil sesuai target. Semua sektor menunjukkan efek positif yang berarti sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang tinggi pada pendapatan propinsi.

Komponen Bauran Industri (Mij) mempunyai efek negatif sebesar Rp -32.130,03 juta, dengan sektor pertanian pula yang menunjukkan pengaruh negatif yang mengandung arti mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih lambat dari pertumbuhan keseluruhan, yang disebabkan hasil panen yang rendah dari para petani.

Bila diamati dari Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij) sektor-sektor yang mempunyai pengaruh positif yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp 271.142,03 juta, yang mempunyai kecepatan untuk tumbuh dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat propinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya para wisatawan asing maupun domestik ke kabupaten Subang. Sedangkan sektor lainnya mempunyai pengaruh yang negatif yang sangat tinggi yaitu sektor industri pengolahan sebesar Rp -10.907,13 juta yang bukan merupakan keunggulan kompetitif atau cenderung menghambat pertumbuhan dibandingkan sektor yang di propinsi Jawa Barat. Secara keseluruhan mempunyai Komponen Keunggulan Kompetitif memberikan pengaruh positif terhadap PDRB kabupaten Subang sebesar Rp 281.673,78 juta.

Secara keseluruhan (Dij) tingkat pertumbuhan pendapatan sektor-sektor ekonomi kabupaten Subang menunjukkan nilai yang positif sebesar Rp 332.603,93 juta. Sektor yang menjadi *Leading Sector* yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai nilai sebesar Rp 300.200,92 juta yang disebabkan oleh meningkatnya para wisatawan baik asing maupun domestik ke objek wisata yang ada di kabupaten Subang.

5.2.4. Tahun 1995-1996

Hasil Perhitungan Analisis *Shift-Share* Kabupaten Subang pada tabel 5.8 (lihat lampiran) terlihat pengaruh Pertumbuhan Propinsi mempunyai efek yang positif terhadap PDRB kabupaten Subang, yaitu sebesar Rp 125.031,49 juta dan juga memberikan efek positif terhadap seluruh sektor. Sektor

pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan terbesar dalam pembentukan PDRB kabupaten Subang sebesar Rp 51.505,83 juta hal ini disebabkan oleh tercapai kembali target panen dari para petani atau tingginya keuntungan yang diperoleh dari sektor pertanian.

Komponen Bauran Industri (Mij) mempunyai pengaruh yang negatif terhadap PDRB kabupaten Subang sebesar Rp -48.935,49 juta, dengan sektor pertanian yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap Komponen Bauran Industri, hal ini mengandung pengertian bahwa sektor pertanian mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan pertumbuhan keseluruhan, yang disebabkan karena hasil panen yang masih rendah.

Bila diamati dari Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij) secara keseluruhan Komponen Keunggulan Kompetitif memberikan pengaruh yang positif terhadap PDRB kabupaten Subang sebesar Rp 29.630,99 juta. Sektor yang memberikan pengaruh positif tertinggi yaitu sektor pertanian sebesar Rp 35.041,21 juta dikarenakan sektor pertanian pada tahun ini merupakan keunggulan kompetitif sehingga mempunyai kecenderungan mempercepat pertumbuhan dibandingkan dengan sektor yang sama di propinsi Jawa Barat.

Secara keseluruhan (Dij) tingkat pertumbuhan pendapatan sektor-sektor ekonomi kabupaten Subang menunjukkan nilai yang positif sebesar Rp 105.781,03 juta. Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar atau merupakan *Leading Sector* dibanding sektor-sektor ekonomi yang lainnya sebesar Rp 37.318,04 juta, yang disebabkan oleh meningkatnya hasil panen.

5.2.5. Tahun 1996-1997

Hasil Perhitungan Analisis *Shift-Share* Kabupaten Subang berdasarkan tabel 5.9 (lihat lampiran) terlihat pengaruh Pertumbuhan Propinsi (Nij) mempunyai efek yang positif terhadap PDRB kabupaten Subang, yaitu sebesar Rp 99.407,88 juta dan juga memberikan efek yang positif terhadap seluruh sektor. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap PDRB kabupaten Subang sebesar Rp 40.576,68 juta, hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari sub sektor perkebunan dan peternakan dan stabilnya pendapatan hasil panen dari tanaman padi.

Komponen Bauran Industri (Mij) mempunyai efek negatif sebesar Rp -88.061,61 juta, dengan sektor pertanian yang menunjukkan pengaruh negatif yang berarti sektor pertanian mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih lambat dari pertumbuhan keseluruhan, yang disebabkan hasil panen yang masih rendah hingga tahun ini.

Bila diamati dari Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij) secara keseluruhan mempunyai Komponen Keunggulan Kompetitif memberikan pengaruh positif terhadap PDRB kabupaten Subang sebesar Rp 52.338,34 juta. Sektor yang memberikan pengaruh positif tertinggi yaitu sektor pertanian sebesar Rp 57.638,36 juta dikarenakan keberhasilan para petani dalam panen hasil taninya.

Secara keseluruhan (Dij) tingkat pertumbuhan pendapatan sektor-sektor ekonomi kabupaten Subang menunjukkan nilai yang positif sebesar Rp 63.702,62 juta. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan sektor

yang memberikan sumbangan terbesar atau merupakan *Leading Sector* dibanding sektor-sektor ekonomi yang lainnya sebesar Rp 33.753,99 juta, yang disebabkan dipengaruhi oleh meningkatnya kunjungan para wisatawan ke kabupaten Subang.

5.2.6. Tahun 1997-1998

Hasil Perhitungan Analisis *Shift-Share* kabupaten Subang berdasarkan tabel 5.10 (lihat lampiran) terlihat pengaruh Komponen Pertumbuhan Propinsi (Nij) mempunyai pengaruh yang negatif terhadap PDRB kabupaten Subang sebesar Rp -306.152,56 juta dan juga memberikan pengaruh negatif terhadap seluruh sektor ekonomi, diantara semua sektor ekonomi tersebut, sektor yang paling rendah peranannya yaitu sektor pertanian sebesar Rp -121.504,97 juta, yang diduga disebabkan masih karena hasil panen yang rendah atau berkurangnya lahan panen di kabupaten Subang. Apabila seluruh sektor memberikan pengaruh yang negatif atau angkanya negatif artinya sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang rendah pada pendapatan propinsi.

Komponen Bauran Industri (Mij) mempunyai pengaruh positif terhadap PDRB yaitu sebesar Rp 85.710,90 juta dan yang memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap pendapatan propinsi yaitu sektor pertanian sebesar Rp 69.381,32 juta, yang disebabkan oleh berhasilnya kembali para petani dalam panen. Hal ini berbeda dengan Komponen Pertumbuhan propinsi yang menunjukkan pengaruh negatif, yang berarti sektor pertanian tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan nasional.

Bila diamati dari Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij) sektor-sektor yang memberikan efek kompetitif positif adalah sektor pertanian sebesar Rp 43.161,64 juta, yang disebabkan oleh tingginya hasil panen dibandingkan sektor yang sama di tingkat propinsi Jawa Barat. Secara keseluruhan Komponen Keunggulan Kompetitif memberikan pengaruh positif terhadap PDRB kabupaten Subang sebesar Rp 76.956,63 juta.

Secara keseluruhan (Dij) tingkat pertumbuhan pendapatan sektor-sektor ekonomi kabupaten Subang menunjukkan pengaruh yang negatif sebesar Rp -143.502,93 juta. Sektor angkutan dan komunikasi merupakan sektor yang memberikan sumbangan tertinggi dibandingkan sektor-sektor yang lainnya sebesar Rp 2.686,99 juta dan menjadi *Leading Sector* karena pada tahun ini komunikasi pesawat telepon sudah mulai dapat masuk ke desa-desa kecil dan permintaan masyarakat pun sangat tinggi.

5.2.7. Tahun 1998-1999

Hasil Perhitungan Analisis *Shift-Share* Kabupaten Subang berdasarkan tabel 5.11 (lihat lampiran) terlihat pengaruh Pertumbuhan Propinsi (Nij) mempunyai efek yang positif terhadap PDRB kabupaten Subang yaitu sebesar Rp 55.140,95 juta dan juga memberikan efek yang positif terhadap seluruh sektor. diantaranya sektor pertanian sebesar Rp 33.892,85 juta, hal ini terjadi karena hasil panen para petani dalam kondisi stabil. Seluruh sektor menunjukkan angka positif artinya sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang tinggi pada pendapatan propinsi.

Komponen Bauran Industri (Mij) mempunyai efek negatif sebesar Rp -7.402,14 juta. Sementara sektor yang memberikan pengaruh negatif, dan yang memberikan kontribusi paling rendah sumbangannya terhadap pendapatan propinsi yaitu sektor pertanian sebesar Rp -9.259,36 juta yang disebabkan lambatnya pertumbuhan sektor pertanian dari pertumbuhan keseluruhan.

Bila diamati dari Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij) secara keseluruhan mempunyai Komponen Keunggulan Kompetitif memberikan pengaruh negatif terhadap PDRB kabupaten Subang sebesar Rp -78.351,64 juta, dan sektor yang menunjukkan pengaruh negatif paling tinggi yaitu sektor pertanian sebesar Rp -74.234,55 juta yang mengindikasikan bahwa sektor pertanian mempunyai kecenderungan untuk menghambat pertumbuhan.

Secara keseluruhan (Dij) tingkat pertumbuhan pendapatan sektor-sektor ekonomi kabupaten Subang menunjukkan pengaruh positif. Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan sumbangan paling besar dibandingkan sektor lainnya (*Leading Sector*) sebesar 17.061,14 juta, hal ini disebabkan oleh adanya keuntungan yang sangat besar dari hasil panen. Secara keseluruhan (Dij) tingkat pertumbuhan pendapatan mempunyai efek yang positif terhadap PDRB yaitu sebesar Rp36.049,37 juta.

5.2.8. Tahun 1999-2000

Hasi Perhitungan Analisis *Shift-Share* Kabupaten Subang berdasarkan tabel 5.12 (lihat lampiran) terlihat pengaruh Pertumbuhan Propinsi (Nij) mempunyai efek yang positif terhadap PDRB kabupaten Subang yaitu sebesar

Rp 80.102,98 juta dan juga memberikan efek yang positif terhadap seluruh sektor, diantaranya sektor ekonomi yang besar peranannya yaitu sektor pertanian sebesar Rp 33.892,85 juta, hal ini disebabkan oleh meningkatnya hasil panen dari para petani di kabupaten Subang. Seluruh sektor menunjukkan angka positif artinya sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang tinggi pada pendapatan propinsi.

Komponen Bauran Industri (Mij) mempunyai pengaruh yang negatif yaitu sebesar Rp -23.249,51 juta, sektor jasa-jasa sebesar Rp -13.657,38 juta yang merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling rendah sumbangannya terhadap pendapatan propinsi, hal ini disebabkan lambatnya pertumbuhan sektor jasa-jasa ini dari pertumbuhan keseluruhan.

Bila diamati dari Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij) secara keseluruhan mempunyai Komponen Keunggulan Kompetitif memberikan pengaruh positif terhadap PDRB kabupaten Subang sebesar Rp 11.757,69 juta, sektor yang paling mempunyai pengaruh positif tertinggi yaitu sektor jasa-jasa sebesar Rp 14.102,94 juta karena sektor ini mempunyai kecenderungan menghambat pertumbuhan dibanding sektor yang sama di propinsi Jawa Barat.

Secara keseluruhan (Dij) tingkat pertumbuhan pendapatan sektor-sektor ekonomi kabupaten Subang menunjukkan pengaruh positif. Sektor yang memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB kabupaten Subang yaitu sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran sebesar Rp 23.938,00 juta, yang disebabkan selalu ramainya para wisatawan yang berkunjung ke

objek wisata di kabupaten Subang. Secara keseluruhan (Dij) tingkat pertumbuhan pendapatan mempunyai pengaruh yang positif terhadap PDRB sebesar Rp 68.521,16 juta.

5.2.9. Tahun 2000-2001

Hasil Perhitungan Analisis *Shift-Share* kabupaten Subang berdasarkan tabel 5.13 (lihat lampiran) terlihat pengaruh Komponen Pertumbuhan Propinsi (Nij) mempunyai pengaruh yang negatif terhadap PDRB kabupaten Subang sebesar Rp -144.527,48 juta dan juga memberikan pengaruh negatif terhadap seluruh sektor ekonomi, diantara semua sektor ekonomi tersebut, sektor yang paling rendah peranannya yaitu sektor Pertanian sebesar Rp -60.305,85 juta, diduga dipengaruhi oleh rendahnya hasil panen dari para petani dan berkurangnya luas panen untuk tanaman padi. Apabila seluruh sektor memberikan pengaruh yang negatif atau angkanya negatif artinya sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang rendah pada pendapatan propinsi.

Komponen Bauran Industri (Mij) mempunyai efek negatif sebesar Rp -135.259,91 juta, yang memberikan kontribusi paling rendah sumbangannya terhadap pendapatan propinsi yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar Rp -71.280,67 juta, karena sektor ini mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih lambat dari pertumbuhan keseluruhan.

Bila diamati Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij) memberikan pengaruh positif terhadap PDRB kabupaten Subang sebesar Rp 382.020,04 juta dan juga mempunyai pengaruh positif terhadap sektor-sektor ekonomi,

sektor yang memberikan pengaruh terbesar yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp 139.285,60 juta, yang juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah para wisatawan.

Secara keseluruhan (Dij) tingkat pertumbuhan pendapatan sektor-sektor ekonomi kabupaten Subang menunjukkan pengaruh positif. Sektor yang mempunyai peranan terbesar dalam pembentukan PDRB kabupaten (*Leading Sector*) yaitu sektor jasa-jasa sebesar Rp 32.089,00 juta, hal ini disebabkan oleh mulai bergairahnya iklim industri di kabupaten Subang. Secara keseluruhan (Dij) tingkat pertumbuhan pendapatan sektor-sektor ekonomi mempunyai pengaruh positif sebesar Rp 102.234,65 juta.

5.2.10. Tahun 2001-2002

Hasil Perhitungan Analisis *Shift-Share* Kabupaten Subang berdasarkan tabel 5.14 (lihat lampiran) terlihat pengaruh Pertumbuhan Propinsi (Nij) mempunyai efek yang positif terhadap PDRB kabupaten Subang yaitu sebesar Rp 71.429,71 juta dan juga memberikan efek yang positif terhadap seluruh sektor, diantaranya sektor ekonomi yang besar peranannya yaitu sektor pertanian sebesar Rp 28.584,51 juta, keberhasilan dalam panen masih merupakan penyebab dari nilai positif sektor pertanian. Seluruh sektor menunjukkan angka positif artinya sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang tinggi pada pendapatan propinsi.

Komponen Bauran Industri (Mij) mempunyai pengaruh negatif sebesar Rp -21.303,78 juta. Sektor yang mempunyai pengaruh terbesar dalam Mij yaitu pengaruh negatif yang sangat tinggi dari sektor pertanian, hal ini

disebabkan oleh sektor pertanian mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih lambat dari pertumbuhan keseluruhan.

Bila diamati dari Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij) dengan sektor yang mempunyai pengaruh positif tertinggi yaitu sektor pertanian sebesar Rp 53.084,88 juta, yang disebabkan oleh sektor tersebut mempunyai kecenderungan untuk menghambat pertumbuhan dibandingkan sektor yang sama di propinsi Jawa Barat. Secara keseluruhan Komponen Keunggulan Kompetitif memberikan pengaruh positif terhadap PDRB kabupaten Subang sebesar Rp 30.998,08 juta.

Secara keseluruhan (Dij) tingkat pertumbuhan pendapatan sektor-sektor ekonomi kabupaten Subang menunjukkan pengaruh positif. Sektor yang memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB kabupaten Subang yaitu sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran sebesar Rp 43.567,01 juta. penyebabnya adalah meningkatnya jumlah para wisatawan yang datang ke kabupaten Subang. Secara keseluruhan (Dij) tingkat pertumbuhan pendapatan mempunyai pengaruh yang positif terhadap PDRB sebesar Rp 81.134,01 juta.

5.3 Perkembangan PDRB Kabupaten Subang Tahun 1993-2002

Perkembangan PDRB kabupaten Subang berdasarkan tabel 5.4 dibawah menunjukkan bahwa PDRB kabupaten Subang periode 1993 sampai 2002 meningkat sebesar Rp 491.289 atau mengalami kenaikan. Sektor yang paling tinggi kenaikannya adalah sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 482,5472 %, kemudian sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 321,3696 %.

Tabel 5.4
PDRB Per Sektor Kabupaten Subang
Atas Dasar Harga Konstan 1993
Tahun 1993 dan 2002 (Jutaan Rupiah)

Sektor	Pendapatan (Jutaan)		Perubahan	
	1993	2002	Absolut	Persen
Pertanian	567.742	731.574	163.832	28,85677
Pertambangan dan Penggalian	1.696	9.880	8.184	482,5472
Industri Pengolahan	110.409	92.832	-17.577	-15,9199
Listri, Gas, dan Air Bersih	4.483	18.890	14.407	321,3696
Bangunan	71.079	67.988	-3.091	-4,34868
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	379.317	574.767	195.450	51,52682
Angkutan dan Komunikasi	27.240	66.651	39.411	144,6806
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	30.501	29.813	-688	-2,25566
Jasa-jasa	185.908	277.269	91.361	49,14312
Total	1.378.375	1.869.664	491.289	1055,6

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Subang diolah

Perkembangan PDRB kabupaten Subang berdasarkan tabel 5.15 sampai tabel 5.23 (lihat lampiran) menunjukkan bahwa PDRB kabupaten Subang mengalami fluktuasi. Untuk tahun 1993 dan 1994 mengalami kenaikan sebesar Rp 75.210. Sektor yang mengalami kenaikan yang paling tinggi yaitu sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 14,90074 %. Pada tahun 1994 dan 1995 PDRB kabupaten Subang mengalami peningkatan sebesar Rp 99.417 atau mengalami kenaikan. Sektor yang paling tinggi kenaikannya adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 27,3345 %, kemudian sektor Angkutan dan Komunikasi sebesar 16,86072 %. Juga untuk tahun 1995 dan 1996 PDRB kabupaten Subang mengalami kenaikan bahkan lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu Rp 105.214. Sektor yang paling tinggi kenaikannya pun masih sama yaitu sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 38,77115 %, dan sektor Angkutan dan Komunikasi sebesar 23,97026 %. Kemudian pada tahun 1996 dan 1997 PDRB kabupaten Subang masih mengalami kenaikan tetapi lebih rendah dari periode

tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 63.668. Sektor yang paling tinggi mengalami kenaikan yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian 11.62261 %.

Sedangkan pada tahun 1997 dan 1998 PDRB kabupaten Subang mengalami penurunan sebesar Rp -123.485. Sektor yang paling tinggi mengalami penurunan yaitu sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar -36.0776 %. Namun pada tahun 1998 dan 1999 PDRB kabupaten Subang mengalami peningkatan kembali setelah periode tahun sebelumnya mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 36.355. Sektor yang paling tinggi mengalami peningkatan yaitu sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 12.7175 %. Begitu pula pada tahun 1999 dan 2000 mengalami kenaikan sebesar Rp 67.226. Sektor yang paling tinggi kenaikannya yaitu sektor yang sama mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 19.55063 %.

Berikutnya tahun 2000 dan 2001 PDRB kabupaten Subang mengalami kenaikan sebesar Rp 86.027. Sektor yang paling tinggi mengalami kenaikan yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 555.4956 %. Pada periode tahun terakhir atau pada tahun 2001 dan 2002 PDRB kabupaten Subang masih mengalami kenaikan sebesar Rp 81.124 dengan sektor yang paling tinggi yang mengalami kenaikan sebesar 8.699058 % yaitu sektor Bangunan.

5.4 Perkembangan PDRB Propinsi Jawa Barat Tahun 1993-2002

Perkembangan PDRB propinsi Jawa Barat berdasarkan tabel 5.5 dibawah ini menunjukkan bahwa PDRB propinsi Jawa Barat periode 1993 sampai 2002 meningkat sebesar Rp 6.157.109 atau mengalami kenaikan. Sektor yang paling

tinggi mengalami kenaikan yaitu sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dengan kenaikan persentase sebesar 77,20794 %.

Tabel 5.5
PDRB Per Sektor Propinsi Jawa Barat
Atas Dasar Harga Konstan 1993
Tahun 1993 dan 2002 (Jutaan Rupiah)

Sektor	Pendapatan (Jutaan)		Perubahan	
	1993	2002	Absolut	Persen
Pertanian	9.107.764	7.666.223	-1.441.541	-15,8276
Pertambangan dan Penggalian	3.761.707	3.126.111	-635.596	-16,8965
Industri Pengolahan	15.948.243	23.631.807	7.683.564	48,17812
Listri, Gas, dan Air Bersih	1.169.776	2.072.936	903.160	77,20794
Bangunan	3.220.480	2.032.148	-1.188.332	-36,8992
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	9.919.222	10.308.097	388.875	3,920418
Angkutan dan Komunikasi	3.080.943	3.220.583	139.640	4,532379
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	2.546.718	2.719.727	173.009	6,79341
Jasa-jasa	5.184.820	5.319.150	134.330	2,590832
Total	53.939.673	60.096.782	6.157.109	73,5998

Sumber : BPS, PDRB Propinsi Jawa Barat diolah

Perkembangan PDRB propinsi Jawa Barat berdasarkan tabel 5.24 sampai tabel 5.32 (lihat lampiran) menunjukkan bahwa pada tahun 1993 dan 1994 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.883.433 dengan sektor ekonomi yang paling tinggi mengalami kenaikan yaitu sektor Industri Pengolahan sebesar 13,75662 %. Untuk tahun 1994 dan 1995 PDRB propinsi Jawa Barat mengalami kenaikan atau peningkatan sebesar Rp 46.680.059 dan sektor yang paling tinggi mengalami peningkatan yaitu sektor Industri Pengolahan sebesar 14,70666 %.

Kemudian pada tahun 1995 dan 1996 PDRB propinsi Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar Rp 5.031.136 dengan sektor ekonomi yang mengalami peningkatan paling tinggi diantara sektor-sektor yang lain yaitu sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 17,52759 %. Selanjutnya pada tahun 1996 dan 1997 PDRB propinsi Jawa Barat mengalami peningkatan lagi sebesar Rp 4.046.623 dengan sektor yang paling tinggi mengalami peningkatan yaitu

sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 13,84301 %. Tetapi pada tahun 1997 dan 1998 PDRB propinsi Jawa Barat mengalami penurunan sebesar Rp -12.721.084 dengan sektor yang paling rendah mengalami penurunan yaitu sektor Bangunan sebesar -46,1664 %. Namun pada tahun 1998 dan 1999 PDRB propinsi Jawa Barat mengalami peningkatan kembali sebesar Rp 323.924 dengan sektor ekonomi yang paling tinggi mengalami peningkatan yaitu sektor Pertanian sebesar 13,53282 %. Untuk tahun 1999 dan 2000 PDRB propinsi Jawa Barat kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 2.948874 dengan sektor yang paling tinggi mengalami peningkatan yaitu sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 18,87134 %.

Namun pada tahun 2000 dan 2001 PDRB propinsi Jawa Barat mengalami penurunan kembali seperti yang terjadi pada periode tahun 1997 dan 1998, namun tidak sebesar pada tahun 1997 dan 1998. Pada tahun 2000 dan 2001 ini mengalami penurunan sebesar Rp -5.360.736 dengan sektor yang mengalami penurunan paling tinggi yaitu sektor Angkutan dan Komunikasi sebesar -26,9631 % dan ada sektor yang sebenarnya mempunyai nilai yang cukup positif pada sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 56,28091 % namun tidak berpengaruh pada perkembangan PDRB. Kemudian pada tahun 2001 dan 2002 PDRB propinsi Jawa Barat kembali mengalami kenaikan atau peningkatan sebesar Rp 2.307.939 dengan sektor yang mengalami peningkatan yang paling tinggi yaitu sektor Angkutan dan Komunikasi sebesar 11,43493 %.

BAB VI

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis *Shift-Share (S-S)* serta uraian-uraian pada sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian kabupaten Subang maka dapat disimpulkan :

1. Dalam sektor-sektor perekonomian kabupaten Subang tahun 1993-2002 menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang peranannya atau kontribusinya terhadap pertumbuhan PDRB kabupaten Subang paling besar dibandingkan sektor-sektor yang lain. Hal ini disebabkan oleh kondisi yang stabil dari hasil panen para petani di kabupaten Subang juga karena kabupaten Subang merupakan salah satu daerah lumbung padi di propinsi Jawa Barat bahkan di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang diduga oleh penulis sudah sesuai atau sudah terjawab. Sedangkan sektor-sektor yang lain tumbuh secara berfluktuasi, tetapi secara umum sektor-sektor tersebut dapat diklasifikasikan sebagai sektor potensial yang mempunyai kontribusi untuk tumbuh dan berkembang lebih besar lagi.
2. Berdasarkan hasil analisis *Shift-Share (S-S)* tahun analisis 1993-2002 menunjukkan bahwa total laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi kabupaten Subang adalah positif yang berarti kontribusi pertumbuhan pendapatan sektor-sektor tersebut lebih besar dari sektor sejenis dalam struktur ekonomi propinsi Jawa Barat. Jika dilihat dari pengaruh komponen pertumbuhan propinsi (Nij) maka pertumbuhan sektor-sektor ekonomi kabupaten Subang terhadap

kontribusi sektor sejenis dalam propinsi Jawa Barat adalah positif karena pertumbuhan sektor-sektor tersebut lebih besar dari sektor sejenis dalam propinsi Jawa Barat.

3. Dari pengaruh baruan industri (Mij) menunjukkan bahwa sektor pertanian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, perdagangan, hotel, dan restoran menunjukkan nilai yang positif yang berarti kontribusi pertumbuhan pendapatan sektor-sektor tersebut lebih besar dari sektor-sektor sejenis dalam propinsi Jawa Barat, sedangkan sektor-sektor lainnya menunjukkan nilai yang negatif ini berarti pertumbuhan sektor-sektor tersebut dibandingkan dengan sektor sejenis dalam propinsi Jawa barat lebih lambat.
4. Dilihat dari pengaruh komponen keunggulan kompetitif menunjukkan bahwa kontribusi pertumbuhan untuk sektor industri pengolahan, sektor bangunan, dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan menunjukkan nilai yang negatif, yang berarti dari segi keunggulan (Cij) kontribusi sektor tersebut kurang kompetitif terhadap pertumbuhan sektor sejenis dalam propinsi Jawa Barat, sedangkan sektor lainnya menunjukkan nilai positif yang berarti sektor-sektor tersebut lebih kompetitif terhadap pertumbuhan sektor sejenis dalam propinsi Jawa Barat.
5. Secara keseluruhan (Dij) tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi kabupaten Subang menunjukkan nilai positif yang berarti kontribusi pertumbuhan pendapatan sektor-sektor tersebut lebih besar dari sektor sejenis dalam propinsi Jawa Barat. Sektor pertanian merupakan sektor yang peranannya atau kontribusinya terhadap pertumbuhan PDRB kabupaten

Subang selama tahun analisis 1993-2002, disusul sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dan jasa-jasa. Sebagai kesimpulan akhir dari analisis *Shift-Share* (S-S) adalah bahwa perekonomian kabupaten Subang didominasi oleh sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar dalam PDRB selama tahun 1993-2002. Kondisi ini juga telah mampu menjawab dari hipotesis penelitian yang kedua.

6.2. Implikasi Kebijakan

Kebijakan ekonomi regional biasanya bertujuan untuk menghilangkan atau berusaha mengurangi perbedaan pertumbuhan ekonomi antara daerah yang pertumbuhannya lambat dengan daerah yang pertumbuhannya cepat, serta mengupayakan agar daerah yang masih terbelakang dapat mengejar ketertinggalannya. Adapun kebijakan yang dapat diterapkan di kabupaten Subang guna mencapai sasaran tersebut diatas adalah :

1. Dalam rangka Otonomi Daerah, pemerintah kabupaten Subang agar selalu memonitor dan mengevaluasi perkembangan sektor-sektor ekonomi khususnya sektor pertanian agar tetap sebagai sektor yang paling besar dalam mendukung PDRB kabupaten Subang.
2. Menempatkan sektor-sektor ekonomi pada proporsi yang sebenarnya terutama sektor pertanian agar dapat bekerja sesuai dengan sumberdaya yang ada.
3. Memantapkan terus program keterkaitan antar sektor ekonomi baik sektor pertanian maupun sektor-sektor lain, sehingga pertumbuhan semua sektor dapat tumbuh dan berkembang setara dengan pertumbuhan sektor-sektor sejenis di propinsi Jawa Barat.